



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta 12940
Telp. (021) 5253004 (8 saluran) Ext. 710, Fax (021) 5253157
Website : <http://www.kemkumham.go.id>

Nomor : SEK-PR.04.02-03

6 Januari 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Yth.

1. Para Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
3. Para Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
- n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Target kinerja merupakan strategi percepatan kegiatan** yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah;
- b. **Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor wajib** melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan target kinerja;
- c. **Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan** melalui aplikasi monitoring kinerja.kemenkumham.go.id;

- d. **Penilaian atas capaian target kinerja dilakukan setiap triwulan** tanggal 6 s.d.15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun 2023 dan tanggal 6 s.d. 15 Januari tahun 2024 oleh Unit Eselon I;
- e. **Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi** dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan tanggal 5 pada bulan April, Juli, Oktober tahun 2023 dan 5 Januari 2024;
- f. **Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester** melalui Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

TARGET KINERJA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2023

“Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM

Semakin **PASTI** dan **Ber-AKHLAK**

dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel”





Apel Pagi Awal Tahun 2023 pada Rabu, (4/1/2023)

PENGANTAR

Memulai kinerja di tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Target Kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, menetapkan 116 Target Kinerja yang meliputi 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah.

Target Kinerja ini diharapkan dapat mengakselerasi implementasi Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 yakni "Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin **PASTI** dan **Ber-AKHLAK** dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel" sehingga dapat mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Maju.

Akhir kata, mari bersama-sama menjalankan Target Kinerja ini dengan sungguh-sungguh untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik lagi.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Yasonna Laoly



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.**
- KESATU** : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah.
- KEDUA** : Target kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
 3. Mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA** : Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman kinerja.kemenkumham.go.id;
 2. Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan;
 3. Unit Utama melakukan verifikasi laporan target kinerja Kantor Wilayah melalui aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 1, tanggal 6 sampai dengan 15 di setiap bulan setelah triwulan berakhir;
 4. Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui Rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA** : Capaian pelaporan target kinerja ditentukan oleh kepatuhan, pelaksanaan, dan pemenuhan data dukung yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
1. **Warna merah** dengan kriteria belum melakukan *upload* data dukung dan data dukung tidak sesuai target capaian;
 2. **Warna kuning** dengan kriteria data dukung belum memenuhi target capaian;
 3. **Warna hijau** dengan kriteria data dukung telah memenuhi target capaian.
- KEENAM** : Penilaian berdasarkan kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA sebagai berikut:
1. Warna merah dengan nilai 0 sampai dengan 50;
 2. Warna kuning dengan nilai 51 sampai dengan 69;
 3. Warna hijau dengan nilai 70 sampai dengan 100.
- KETUJUH** : Untuk melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEDELAPAN** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:
1. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tidak melaksanakan Target Kinerja;
 2. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi capaian kinerja.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

DAFTAR ISI

TARGET KINERJA UNIT UTAMA

Sekretariat Jenderal	1
Inspektorat Jenderal	7
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	17
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	23
Direktorat Jenderal Imigrasi	58
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	64
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	79
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	83
Badan Pembinaan Hukum Nasional	92
Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM	94
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97

TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH

Divisi Administrasi	1
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	7
Divisi Pemasyarakatan	54
Divisi Imigrasi	85

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B09: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan kegiatan Pendampingan Evaluasi Penilaian SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B10: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B11: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B12: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p>	
15	Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko	Implementasi Manajemen Risiko	Pelaksanaan Pendampingan atas Penerapan Manajemen Risiko dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	<p>B01: Surat Irjen ke seluruh satker di lingkungan Kemenkumham</p> <p>B02: Hasil survei seluruh satker</p> <p>B03: Notula/Laporan <i>Workshop</i> persiapan pelaksanaan pendampingan penerapan MR</p>	Inspektorat Wilayah III

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					B04: SP Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR B05: SP Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR B06: Laporan Kompilasi Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR B07: Surat Irjen ke satker yang akan dilakukan evaluasi penerapan MR B08: Hasil Survei Evaluasi Penerapan MR B09: SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR B10 : SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR B11 : SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR B12: Laporan kompilasi Evaluasi Penerapan MR	
16	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan pelaksanaan pengawasan	Pelaksanaan pengawasan yang efektif mengacu pada perencanaan kegiatan	Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan	Pelaksanaan Pengawasan melalui Pendampingan, Reviu dan Audit terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	B01: Matriks hasil pemetaan temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan BPK dan Inspektorat Jenderal B02: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan	Inspektorat Wilayah IV

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B03: 1. Laporan Kinerja Triwulan 2. Laporan Hasil Reviu 3. Laporan Hasil pendampingan dan audit 4. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja</p>	
					<p>B04: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B05: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B06: 1. Laporan Pelaksanaan pendampingan, reviu dan audit 2. Laporan Kinerja Semester 3. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja.</p>	
					<p>B07: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B08: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	
					<p>B09: 1. Laporan Pelaksanaan Hasil Audit dan Reviu 2. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja. 3. Laporan Kinerja Triwulan</p>	
					<p>B10: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					B11: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan B12: 1. Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Audit Tahun 2022	
17	Terbentuknya Zona Integritas pada Satuan Kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Satuan kerja berpredikat WBK/WBBM yang ditetapkan oleh TPN	8% dari Satuan Kerja Usulan TPI ke TPN memperoleh predikat WBK/ WBBM	B01: 1. SK Menteri perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 2. SK Irjen perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 3. Surat Inspektur Jenderal perihal Penetapan Kalender Kerja TPI dalam Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 B02: Laporan Kegiatan FGD Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM B03: Surat Kepala Unit Eselon I perihal Pengajuan Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023	Inspektorat Wilayah VI

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Inspektur Jenderal perihal Penetapan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 2. Laporan Hasil Pelaksanaan <i>Workshop</i> Persiapan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 3. Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 <p>B05</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Panel TPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 kepada Inspektur Jenderal 2. Laporan hasil Evaluasi satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Kementerian Hukum dan HAM kepada Menteri Hukum dan HAM RI 3. SK Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Satuan Kerja ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan Surat Pengusulan Ke Menpan RB <p>B06:</p> <p>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi satuan kerja yang sudah mendapatkan predikat WBBM pada tahun kedua.</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
					<p>B07: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi satuan kerja yang sudah mendapatkan predikat WBBM pada tahun kedua</p> <p>B08-09: Laporan Hasil Pendampingan Desk Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh TPN Tahun 2023</p> <p>B10: Desk Evaluasi Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh TPN</p> <p>B11: Laporan Hasil Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh TPN dengan Metode Verifikasi Lapangan Tahun 2023</p> <p>B12: Undangan Menpan RB kepada Menteri Hukum dan HAM perihal Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 2023 pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM						
18	Implementasi <i>Corporate University</i> dalam peningkatan kompetensi SDM Pegawai Ditjen AHU untuk meningkatkan layanan AHU	Meningkatnya pemahaman seluruh pegawai Ditjen AHU terhadap layanan AHU	Terciptanya SDM yang unggul dalam memberikan pelayanan AHU terbaik kepada masyarakat	<p>B01 Melakukan Identifikasi Kebutuhan Bimtek Pegawai AHU</p> <p>B02 Pembentukan TIM Pengajar dan Penyusun Materi Bimtek</p>	<p>B01 Daftar Inventarisasi Kebutuhan Bimtek</p> <p>B02 SK TIM Penyusun Materi Bimtek</p>	Sekretariat Ditjen AHU (Kepegawaian)

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Menyusun materi Bimtek	B03 Materi Bimtek	
				B04 Opsi 1 Bimtek Layanan Perdata	B04 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Perdata (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B05 Bimtek Layanan Perdata	B05 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Perdata (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B06 Bimtek Layanan tata Negara	B06 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Tata Negara (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B07 Bimtek Layanan OPHI	B07 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan OPHI (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B08 Bimtek Layanan Pidana	B08 Laporan pelaksanaan Bimtek Layanan Pidana (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09 Bimtek TI	B09 Laporan pelaksanaan Bimtek TI (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B10 Bimtek Dukungan Manajemen	B10 Laporan pelaksanaan Bimtek Dukungan Manajemen (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11 Bimtek Dukungan Manajemen	B11 Laporan pelaksanaan Bimtek Dukungan Manajemen (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12 Evaluasi Pelaksanaan Bimtek	B12 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Bimtek	
19	Pencetakan Sertifikat Apostille di Kantor Wilayah Kemenkumham	Pelaksanaan pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah Kemenkumham	Jumlah pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah Kemenkumham	B01 – B03 Inventarisasi dan Identifikasi data permohonan <i>Apostille</i>	B01-B03 Data Statistik jumlah permohonan dan asal dokumen <i>Apostille</i> di wilayah	
				B04 Koordinasi dengan Kantor Wilayah	B04 Laporan Hasil Koordinasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B05-B06 Persiapan Layanan <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah (Pengembangan Aplikasi dan Persiapan Infrastruktur)	B05-B06 Laporan Persiapan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B07 <i>Training of Trainer</i> Layanan <i>Apostille</i> untuk Kantor Wilayah	B07 Laporan Pelaksanaan <i>Training of Trainer</i> Layanan <i>Apostille</i> (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B08 Uji Coba Aplikasi dengan Pemohon Kantor Wilayah	B08 Laporan pelaksanaan Uji Coba Aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09 Asistensi Implementasi pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah	B09 Laporan Asistensi Implementasi pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10 Asistensi Implementasi pencetakan Sertifikat <i>Apostille</i> di Kantor Wilayah	B10 Laporan Implementasi pencetakan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B11 Evaluasi	B11 Laporan Evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
20	Membangun informasi data Notaris terkait Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN berbasis <i>Online</i> .	Update informasi data Notaris, kemudahan & transparansi serta percepatan pelaksanaan tugas MPN & MKN melalui pelayanan berbasis <i>Online</i>	Terwujudnya seluruh Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN berbasis <i>Online</i> yang berskala Nasional	B01 Penyusunan daftar inventaris masalah	B01 Daftar Inventarisasi Masalah	Direktorat Perdata (Notariat)
				B02 Penyusunan Draft <i>Grand Design</i>	B02 1. Laporan Penyusunan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft <i>Grand Design</i>	
				B03 Finalisasi <i>Grand Design</i>	B03 1. Laporan Finalisasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. <i>Grand Design</i>	
				B04-B06 Pengembangan sistem layanan kenotariatan, MPN & MKN secara <i>Online</i> .	B04-B06 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B07-B08 Pengembangan system layanan kenotariatan, MPN & MKN secara <i>Online</i> .	B07-B08 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09 Uji coba system layanan kenotariatan, MPN & MKN secara <i>Online</i> .	B09 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10-B11 Sosialisasi Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN secara <i>Online</i>	B10-B11 Laporan Sosialisasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12 Evaluasi Terkait Penggunaan Layanan Kenotariatan, MPN dan MKN	B12 Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
21	Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	Tersusunnya Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B01: Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan dan Koordinasi Awal	B01: 1. SK Tim 2. Laporan Koordinasi Awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	Direktorat Perdata
				B02: Rapat Pembahasan penyusunan daftar Identifikasi Permasalahan	B02: Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B03 Rapat Pembahasan penyusunan daftar Identifikasi Permasalahan	B03 1. Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Daftar Inventarisasi Masalah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04 Rapat Pembahasan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B04 Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B05 Rapat Pembahasan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B05 Laporan Rapat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B06 Penyusunan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B06 1. Laporan penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft Kebijakan	
				B07 Penyusunan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B07 1. Laporan penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft Kebijakan	
				B08 Penyusunan draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B08 1. Laporan penyusunan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Draft Kebijakan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 Finalisasi draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B09 Laporan Finalisasi Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B10 Finalisasi draft Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B10 Laporan Finalisasi Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B11 Penetapan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan	B11 1. Laporan Penetapan Kebijakan Penguatan Balai Harta Peninggalan dalam Proses Kepailitan(lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Kebijakan yang telah ditandatangani	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN						
22	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Tahanan	Menurunnya angka <i>Overstaying</i> Tahanan di Lapas dan Rutan	B01 Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan <i>overstaying</i> tahanan	B01 SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan <i>overstaying</i> tahanan	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran
				B02 <i>Mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	B02 Laporan <i>mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Mapping data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	B03 Laporan <i>mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, dan tahanan <i>overstaying</i> pada UPT Lapas/Rutan	
				B04 Melaksanakan FGD Mahkumjakpol terkait penanganan <i>overstaying</i> tahanan	B04 Laporan Pelaksanaan FGD Mahkumjakpol terkait penanganan <i>overstaying</i> tahanan	
				B05 Melaksanakan Desiminasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	B05 Laporan Pelaksanaan Deseminasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	
				B06 Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	B06 Laporan Pelaksanaan Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	
				B07 Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	B07 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling	
				B08 Sosialisasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	B08 Laporan Sosialisasi Penanganan <i>Overstaying</i> Tahanan	
				B09 Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling Tahanan	B09 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi <i>Aessment</i> dan Klasifikasi Tahanan dan Sosialisasi Buku Standar Mapenaling	
				B10 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	
23	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di bidang Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	Terselenggara Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	B01 Penyusunan SK Tim Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B01 SK Tim Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran
				B02 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B02 Laporan Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	
				B03 Asistensi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B03 Laporan Asistensi Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	
				B04 Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B04 Laporan FGD Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	
				B05 Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B05 Laporan Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	
				B06 Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan.	B06 Laporan FGD Pelaksanaan FGD Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07 Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	B07 Laporan Uji Petik Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Pembudayaan Ideologi Pancasila bagi Petugas Rutan dan Tahanan	
				B08 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B08 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Tahanan Miskin	
				B09 Supervisi Pelayanan Tahanan	B09 Laporan Supervisi Pelayanan Tahanan	
				B10 Supervisi Pelayanan Tahanan	B10 Laporan Pelayanan Tahanan	
				B11 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Tahanan Kegiatan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Hukum	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
24	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pengelolaan basan baran	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar.	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar.	B01 Sosialisasinya Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B01 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran
				B02 Sosialisasinya Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B02 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Sosialisasinya Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B03 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B04 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B04 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B05 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B05 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B06 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B06 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B07 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B07 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B08 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B08 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	
				B09 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B09 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
25	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakat	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakat.	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakat.	B01: Sosialisasi SK Direktur Jenderal Masyarakat tentang Penetapan UPT Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B01: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
				B02: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B02: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B03: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B03: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B04: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B04: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B05: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B05: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B06: Bimtek Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023	B06: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek	
				B07: Monitoring UPT Masyarakat Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakat	B07: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	B08: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B09: Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	B09: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B10: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B01- 06)	B10: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Januari-Juni 2023	
				B11: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B07- 09)	B11: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Juli-September 2023	
				B12: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B10-12)	B12: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Oktober-Desember 2023	
26	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan bagi tahanan dan WBP	Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC Komprehensif dan Berkesinambungan bagi Tahanan dan Warga Binaan	Tersusunnya Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan pada 40 UPT Pemasyarakatan	B01: Persiapan Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B01: Laporan Pelaksanaan Rapat Persiapan, dan Draft SK Tim Penyusun	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
				B02: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B02: Laporan Pelaksanaan Hasil FGD I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B03: Laporan Pelaksanaan Hasil FGD II	
				B04: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B04: Laporan Pelaksanaan Hasil Uji Petik.	
				B05: Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B05: Laporan Pelaksanaan Hasil Uji Petik	
				B06: Finalisasi Penyusunan Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B06: Draft Final, dan Nota Dinas Pengajuan Legalitas Standar.	
				B07: Diseminasi Standar Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC bagi Tahanan dan Warga Binaan	B07: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Standar.	
				B08: Penguatan Kapasitas 40 Kepala UPT Masyarakat Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B08: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B09: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas	
				B10: Penguatan Kapasitas Petugas Kesehatan 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B10: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas	
				B11: Monitoring Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC Komprehensif dan Berkesinambungan bagi Tahanan dan Warga Binaan	B11: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring	
				B12: Monitoring Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit Menular HIV-AIDS dan TBC Komprehensif dan Berkesinambungan bagi Tahanan dan Warga Binaan	B12: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring	
27	Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan	Terpenuhinya asupan makanan tahanan/anak binaan/narapidana sesuai angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan	85% tahanan/anak binaan/narapidana memiliki status gizi normal selama berada di Rutan/LPKA/Lapas	B01 : Pembentukan tim penyusunan kajian tentang ketercukupan angka kecukupan gizi yang tertuang di dalam Permenkumham 40 Tahun 2017	B01 : SK Tim	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B02 : • Supervisi Permenkumham 40 Tahun 2017 • Penyusunan rencana program kegiatan pengukuran status gizi di UPT <i>Pilot Project</i>	B02 : •Laporan supervisi •Program dan <i>timeline</i>	
				B03 : • Penyusunan dan Penetapan UPT <i>Pilot Project</i> • Rapat koordinasi tentang kegiatan pengukuran status gizi	B03 : •SK UPT <i>Pilot Project</i> • Laporan pelaksanaan rapat koordinasi tentang kegiatan pengukuran status gizi	
				B04 : •Pengukuran status gizi tahanan/anak binaan/narapidana di UPT <i>Pilot Project</i> wilayah I; • Penyuluhan dan edukasi gizi wilayah I	B04 : • Laporan pelaksanaan pengukuran status gizi wilayah I • Laporan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi gizi wilayah I	
				B05 : • Pengukuran status gizi tahanan/anak binaan/narapidana di UPT <i>Pilot Project</i> wilayah II dan III; • Penyuluhan dan edukasi gizi wilayah II dan III	B05 : • Laporan pelaksanaan pengukuran status gizi wilayah II dan III; • Laporan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi gizi wilayah II dan III	
				B06 : Evaluasi program pengukuran status gizi wilayah I, II dan III	B06 : laporan evaluasi wilayah I, II dan III	
				B07 : • Pengukuran status gizi tahanan/anak binaan/narapidana di UPT <i>Pilot Project</i> wilayah IV dan V; • Penyuluhan dan edukasi gizi wilayah IV dan V	B07 : • Laporan pelaksanaan pengukuran status gizi wilayah IV dan V; • Laporan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi gizi wilayah IV dan V	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Evaluasi program pengukuran status gizi wilayah IV dan V	B08 : laporan evaluasi wilayah I, II dan III	
				B09 : Penyusunan kajian tentang ketercukupan angka kecukupan gizi yang tertuang di dalam	B09 : Draft Rekomendasi kebijakan	
				B10 : Penyusunan kajian tentang ketercukupan angka kecukupan gizi yang tertuang di dalam Permenkumham 40 Tahun 2017	B10 : Rekomendasi kebijakan	
				B11 : Monitoring dan evaluasi	B11 : Laporan monitoring dan evaluasi	
				B12 : Monitoring dan evaluasi	B12 : Laporan monitoring dan evaluasi	
28	Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat.	Tersusunnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat	Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat	B01: Pembentukan SK Tim Perumusan Usulan Peraturan Meteri Hukum dan HAM tentang Sistem Informasi Masyarakat	B01: SK Tim Perumusan Usulan Peraturan Meteri Hukum dan HAM tentang Sistem Informasi Masyarakat	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
				B02: Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat.	B02: Laporan Kegiatan Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat	
				B03: Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat	B03: Laporan Kegiatan Perumusan Konsep <i>Policy Brief</i> Sistem Informasi Masyarakat	
				B04: Penyusunan Naskah Pra Kebijakan bersama Balitbang HAM.	B04: Naskah Pra Kebijakan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05: Pembahasan <i>Outline</i> Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	B05: Laporan Pembahasan <i>Outline</i> Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	
				B06: Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	B06: Laporan Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	
				B07: Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	B07: Laporan Pembahasan Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	
				B08: Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah	B08: Laporan kegiatan Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah	
				B09: Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah	B09: Laporan kegiatan Uji Petik Konsep Rancangan Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat 1 wilayah.	
				B10: Harmonisasi Konsep Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat.	B10: Laporan Kegiatan Harmonisasi Konsep Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	
				B11: Pengesahan Konsep Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	B11: Permenkumham tentang Penerapan Sistem Informasi Masyarakat	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Sosialisasi Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	B12: Laporan Sosialisasi Permenkumham tentang Sistem Informasi Masyarakat	
29	Penguatan SDP Masyarakat dalam rangka transformasi layanan masyarakat melalui pertukaran data SPPT TI	Penerapan SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan	Penerapan SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan	B01: 1.Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Ditjenpas Tahun 2023 2.Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	B01: 1.SK Tim Pelaksana SPPT TI Ditjenpas Tahun 2023 2.SK UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
				B02: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B02: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B03: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B03: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B04: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B04: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B05: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B05: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B06: 1.Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester I	B06: 1.Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B07: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B07: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B08: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B08: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B09: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B09: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B10: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B10: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B11: 1.Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester II	B11: 1.Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan 2.Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI Semester II	
				B12: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B12: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
30	<i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	<i>Piloting</i> Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 wilayah yaitu: 1. Kota Denpasar (Bali) 2. Kota Manado	Terlaksananya penerapan keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah yaitu: 1.Kota Denpasar	B01: Pembentukan SK Tim B02: Perencanaan Rapat Kordinasi 10 Wilayah	B01: SK Tim B02: Laporan Perencanaan <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa	Direktorat Bimbingan Kemasyaratan dan Pengentasan Anak

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		(Sulawesi Utara) 3. Jambi (Jambi) 4.Mataram (Nusa Tenggara Barat) 5.Pontianak (Kalimantan Barat), 6. Samarinda (Kalimantan Timur) 7. Bengkulu (Bengkulu) 8. Kendari (Sulawesi Tenggara) 9. Pekanbaru (Riau) 10. Padang (Sumatra Barat)	(Bali) 2. Kota Manado (Sulawesi Utara) 3. Jambi (Jambi) 4.Mataram (Nusa Tenggara Barat) 5.Pontianak (Kalimantan Barat), 6.Samarinda (Kalimantan Timur) 7. Bengkulu (Bengkulu) 8. Kendari (Sulawesi Tenggara) 9. Pekanbaru (Riau) 10.Padang (Sumatra Barat)	B03: Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa di 10 Wilayah	B03: Laporan Pelaksanaan Asistensi <i>Online</i> Persiapan Rapat Koordinasi Tentang <i>Piloting</i> Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa di10 Wilayah	
				B04: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah.	B04: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	
				B05: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah.	B05: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	
				B06: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah	B06: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	
				B07: Rapat Kordinasi dan Sosialisasi Pedoman Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada 2 Wilayah.	B07: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada wilayah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B08: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah.	
				B09: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B09: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah.	
				B10: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B10: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah	
				B11: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B11: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah	
				B12: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada 2 Wilayah	B12: Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan pada wilayah	
31	Pemberdayaan Pokmas bagi Klien Pemasarakatan	Peningkatan Jumlah Pemberdayaan Pokmas	Terbentuknya Rumah Singgah atau Rumah	B01: Penyusunan SK Tim Asistensi Pemberdayaan Pokmas Lipas	B01: SK Tim Asistensi Pemberdayaan Pokmas Lipas	Direktorat Bimbingan Kemasyaratan dan Pengentasan Anak

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		Lipas dan Penerima Manfaat	Kolaborasi "Griya Abhipraya"	B02: Asistensi Penyusunan Rencana Program Pemberdayaan Pokmas Lipas (33 wilayah)	B02: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B03: Sosialisasi Program Pembentukan Griya Abhipraya	B03: Laporan Kegiatan Sosialisasi	
				B04: Pemetaan Peluang Rencana Pembentukan Griya Abhipraya di Bapas	B04: Dokumen Hasil Pemetaan Peluang	
				B05: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (8 wilayah)	B05: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B06: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (8 wilayah)	B06: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B07: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (8 wilayah)	B07: Laporan Kegiatan Asistensi	
				B08: Asistensi Pelaksanaan Pemberdayaan Pokmas Lipas dan Konsultasi Program Pembentukan Griya Abhipraya (9 wilayah)	B08: Laporan Kegiatan Asistensi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (8 wilayah)	B09: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
				B10: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (8 wilayah)	B10: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
				B11: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (8 wilayah)	B11: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
				B12: Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pokmas Lipas (9 wilayah)	B12: Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	
32	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana	1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat	B01: Koordinasi dengan Kanwil terkait pembentukan tanda daftar bengkel kerja Lapas menjadi Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK)	B01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pembentukan tanda daftar bengkel kerja Lapas menjadi Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK)	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
				B02: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B02: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B03: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftar nya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	B03: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B04: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B05: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B05: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B06: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftarnya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	B06: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	
				B07: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B07: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B08: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B08: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftar nya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	B09: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan	
				B10: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B10: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B11: Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia	B11: Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A	
				B12: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas seluruh Indonesia 2. Terdaftar nya bengkel kerja Lapas di Kemenaker sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan 3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan latihan keterampilan di Lapas	B12: 1. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A 2. Laporan bengkel kerja Lapas yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Keterampilan 3. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen	Narapidana yang dinilai dan memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%	<p>B01 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana. 2. Penyusunan surat edaran tentang tindak lanjut tarja tahun 2023 	<p>B01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft surat edaran tentang tindak lanjut tarja tahun 2023. 2. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana. 3. Laporan hasil penilaian pembinaan pada bulan Desember 	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
<p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Ditandatanganinya Surat Edaran tentang tindak lanjut tarja dibidang pembinaan kepribadian 	<p>B02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Surat edaran tentang tentang tindak lanjut tarja dibidang pembinaan kepribadian 					
<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara. 2.55% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan program pembinaan kepribadian pada bulan Februari. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 					

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.60% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.60% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.60% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.60% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret. 	<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret. 2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Maret. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 	
				<p>B05:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.65% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.65% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.65% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.65% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan April. 	<p>B05:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan April. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan April. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06:</p> <p>1.70% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.70% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.70% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.70% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p>	<p>B06:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Mei. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B07:</p> <p>1.75% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.75% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.75% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.75% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p>	<p>B07:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juni. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B08:</p> <p>1.80% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.80% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.80% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.80% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p>	<p>B08:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juli. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B09:</p> <p>1.85% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.85% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.85% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.85% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p>	<p>B09:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Agustus. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B10:</p> <p>1.90% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.90% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.90% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.90% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p>	<p>B10:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan September. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B11:</p> <p>1.95% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.95% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.95% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.95% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p>	<p>B11:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Oktober. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: 1.100% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.100% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.100% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.100% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan November.	B12: 1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan November. 2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan November. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)	
33	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B01: Menyusun Surat Edaran terkait Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B02 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B03 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B04 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B05 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B01: Surat Edaran Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan B02 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan B03 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan B04 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan B05 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B06 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B07 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B07 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B08 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B08 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B09 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B09 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B10 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B10 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B11 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B11 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B12 Melakukan Monitoring Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B12 Laporan Bulanan Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
34	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian bekerja sama/bermitra dengan pihak ketiga.	Terselenggaranya kegiatan produktif pada Lapas dengan melaksanakan kemitraan minimal 3 (tiga) mitra.	B01: Koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan.	B01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			<p>Jumlah Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Kemandirian sbb:</p> <p>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p>	<p>B02: Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb:</p> <p>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang <i>Pilot Project</i> Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p>	<p>B02: Laporan Rekapitulasi Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas</p>	
				<p>B03: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B03: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	
				<p>B04: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	<p>B04: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	
				<p>B05: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	<p>B05: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	
				<p>B06: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B06: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	
				<p>B07: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B07: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B08: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B09: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B09: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B10: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B10: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B11: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B11: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B12: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B12: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
35	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan peningkatan Kepatuhan Internal Petugas	Meningkatnya Kepatuhan Internal Petugas dalam meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban	1.Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan penginputan SDP Fitur Keamanan secara baik dan benar 2.Melakukan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan	B01 Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh Divisi Pemasyarakatan	B01 Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja	Direktorat Keamanan dan Ketertiban
				B02 Pembentukan Operator SDP di tingkat pusat, wilayah dan UPT	B02 SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat pusat, wilayah dan UPT	
				B03 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait penginputan SDP Fitur Keamanan sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat 2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik	B03 1. Laporan pelaksanaan konsultasi teknis 2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait penginputan SDP Fitur Keamanan sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah 2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik	B04 1. Laporan pelaksanaan konsultasi teknis 2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan	
				B05 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait penginputan SDP Fitur Keamanan sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur 2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik	B05 1. Laporan pelaksanaan konsultasi teknis 2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan	
				B06 1. Sebanyak 50% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar. 2. Melaksanakan sidang kode etik terhadap petugas yang melanggar kode etik	B06 1. Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan 2. Laporan pelaksanaan sidang kode etik terhadap petugas yang melanggar kode etik	
				B07 Sebanyak 60% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar	B07 Sebanyak 60% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08 Sebanyak 80% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar	B08 Sebanyak 80% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar	
				B09 1. Sebanyak 100% Lapas, Rutan dan LPKA telah melaksanakan input data keamanan pada SDP fitur keamanan dengan baik dan benar 2. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melanggar kode etik	B09 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik bagi petugas masyarakat	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban	
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban	